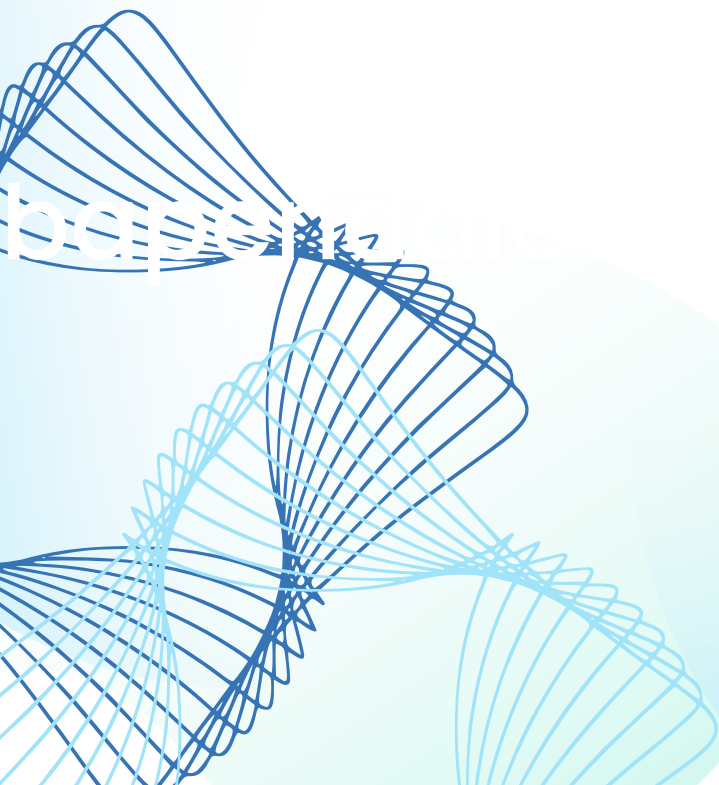




RENCANA KERJA

2026



 <https://bapenda.lomboktimurkab.go.id/>

 bapendalotim

 +62 817-1717-0220

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja.

Rencana Kerja Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya dokumen ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi setiap elemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, serta sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Selain itu, merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan visi Kabupaten Lombok Timur, yakni "**Lombok Timur Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan (LOTIM SMART)**". Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen- dokumen lainnya.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari semua pihak untuk kesempurnaan agar penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Rencana Kerja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Selong, Mei 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUSSEN SKM.,MM.

Pemuda Utama Muda (IV/c)

NIP. 19681231 198803 1 174

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	3
3. Maksud dan Tujuan	4
4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKT SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	19
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	23
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
4.1 Perogram dan Kegiatan	28
BAB V PENUTUP	32
5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	32
5.2. Rencana Tindak Lanjut	33

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan strategis menjadi langkah awal bagi suatu instansi dalam menjawab tuntutan lingkungan, baik secara global maupun lokal agar tetap berada dalam lingkup tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu perencanaan strategis yang baik memiliki kejelasan dan selalu sinergis, sehingga instansi pemerintah tersebut mampu untuk melakukan penyelarasan baik visi dan misi yang ada dengan potensi, peluang, serta kendala yang sedang terjadi atau dihadapi dalam hal upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Acuan yang digunakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar lebih efektif dan efisien, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur adalah dokumen perencanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berorientasi pada cita-cita masa depan yang lebih baik.

Sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menuju Kabupaten Lombok Timur lebih sejahtera, maju dan berdaya saing.

Dengan kata lain, bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan. Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan kemandiriannya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Tahunan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategi (RENSTRA) OPD.

Seiring dengan itu dan sesuai dengan kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, yaitu merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan, dipandang perlu menyusun suatu Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada setiap tahun anggaran.

Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis - Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang diformulasikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan BAPENDA Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa

- Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok timur Tahun 2023 Nomor 9).

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini adalah :

- a. Memberikan arahan dan panduan bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam jangka waktu satu tahun;

- b. Memberikan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu satu tahun;
- c. Sebagai Dasar penyusunan program dan kegiatan dalam KUA PPAS tahun 2026.

4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) BAPENDA Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2025 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

- 5.1. Catatan Penting Yang Perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun sendainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKT TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKT SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Reviu berdasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan perkiraan pelaksanaan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Perangkat Daerah tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah tahun 2026 berpedoman pada hasil pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025, RPD tahun 2025-2026 dan rencana strategis (renstra) Badan Pendapatan daerah periode 2025-2026. Berdasarkan evaluasi hasil Renja tahun 2024 badan Pendapatan Daerah dan realisasi berjalan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel II.1 (TC. 29) Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra perangkat daerah sampai dengan tahun 2025.

Tabel II.1 (TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Propinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2026 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja OPD Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s.d. Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sd Th 2025 (%)	
			Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	82,5	85.399.710.959	87,23	41.697.548.844	79,50	19.814.567.362	-	2.298.400.087	-	11,60	43,62	43.995.948.931	52,87	51,52
5 02 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	199.882.446	100	126.641.570	100	230.057.450	38	15.286.800	37,50	6,64	69	141.928.370	68,75	71,01
5 02 01 201 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	93.416.949	12	60.560.610	6	50.675.750	3	9.400.000	50,00	18,55	15	69.960.610	250,00	74,89
5 02 01 201 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	28.500.192	12	20.413.500	-	-	-	-	-	-	12	20.413.500	200,00	71,63
5 02 01 201 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	77.965.305	4	45.667.460	2	179.381.700	-	5.886.800	-	3,28	4	51.554.260	200,00	66,12
5 02 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Tepat Waktu	%	100	22.537.916.641	89,59	21.106.697.611	100	16.208.191.673	29	1.894.454.190	28,52	11,69	59	23.001.151.801	59,05	102,06
5 02 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1120	21.961.757.691	1.199	20.669.202.813	1.106	15.983.145.363	316	1.853.780.590	28,57	11,60	1.515	22.522.983.403	135,22	102,56
5 02 01 202 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	550.296.087	24	414.697.068	12	210.610.480	3	40.173.600	25,00	19,07	27	454.870.668	225,00	82,66
5 02 01 202 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	7.800.508	2	7.423.525	1	4.839.625	1	-	100,00	-	3	7.423.525	300,00	95,17
5 02 01 202 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	18.062.355	6	15.374.205	3	9.596.205	-	500.000	-	5,21	6	15.874.205	200,00	87,89
5 02 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	33.741.657	200	29.352.440	100	15.147.440	-	2.692.440	-	17,77	200	32.044.880	200,00	94,97
5 02 01 203 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	33.741.657	4	29.352.440	2	15.147.440	-	2.692.440	-	17,77	4	32.044.880	200,00	94,97

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2026 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja OPD Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s.d. Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sd Th 2025 (%)	
							Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4			5		6		7		8		9		10	
5	02	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah	%	100	65.478.170	100	37.701.700	100	58.931.300	25	12.870.000	25,00	21,84	63	50.571.700	62,50	77,23
5	02	01	204	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	65.478.170	24	37.701.700	12	58.931.300	3	12.870.000	25,00	21,84	27	50.571.700	225,00	77,23
5	02	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	%	100	641.936.049	100	263.323.190	100	402.911.090	22	44.335.690	22,22	11,00	61	307.658.880	61,11	47,93
5	02	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	328.788.417	10	223.323.190	5	327.911.090		44.335.690	-	13,52	10	267.658.880	200,00	81,41
5	02	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	313.147.632	4	40.000.000	4	75.000.000		-	-	-	4	40.000.000	100,00	12,77
5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	1.935.625.995	95	499.938.573	100	564.970.220	16	22.416.680	16,00	3,97	56	522.355.253	55,50	26,99
5	02	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	49.029.931	17	5.898.500	12	2.186.500	2	-	16,67	-	19	5.898.500	158,33	12,03
5	02	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	22	81.418.384	22	8.294.810	16	8.487.220	2	-	12,50	-	24	8.294.810	109,09	10,19
5	02	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	612.992.078	22	269.401.000	11	177.334.500	2	-	18,18	-	24	269.401.000	218,18	43,95
5	02	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	77.380.032	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	8,33	-
5	02	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	488.510.306	15	127.944.263	10	206.813.000	1	8.116.680	10,00	3,92	16	136.060.943	160,00	27,85
5	02	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	626.295.264	1	88.400.000	1	170.149.000	-	14.300.000	-	8,40	1	102.700.000	100,00	16,40
5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset yang direncanakan	%	100	3.044.284.649	100	492.782.000	100	1.340.907.330	20	203.055.000	20,00	15,14	60	695.837.000	60,00	22,86
5	02	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	715.474.278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	394.309.561	5	94.054.000	5	1.340.907.330	1	203.055.000	20,00	15,14	6	297.109.000	120,00	75,35
5	02	01	207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	8	1.934.500.810	2	398.728.000	-	-	-	-	-	-	2	398.728.000	25,00	20,61
5	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	%	100	55.094.967.625	100	17.998.714.390	100	118.576.344	25	14.061.878	25,00	11,86	63	18.012.776.268	62,50	32,69
5	02	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12.850.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	55.082.117.329	24	17.998.714.390	12	118.576.344	3	14.061.878	25,00	11,86	27	18.012.776.268	225,00	32,70
5	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	1.590.051.640	100	1.142.397.370	100	874.874.515	14	89.227.409	14,49	10,20	57	1.231.624.779	57,25	77,46
5	02	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	314.144.694	19	91.484.488	1	82.150.000	1	1.018.939	100,00	1,24	20	92.503.427	2.000,00	29,45

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pd Thn 2026 (s.d. Akhir Periode Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja OPD Th 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra OPD s.d. Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD sd Th 2025 (%)			
			Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	Induk (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10			
5 02 01 209 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	67	916.642.040	110	580.955.227	63	374.674.515	7	20.308.470	11,11	5,42	117	601.263.697	174,63	65,59		
5 02 01 209 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6	325.673.537	5	469.957.655	5	67.900.000	2	67.900.000	40,00	100,00	7	537.857.655	116,67	165,15		
5 02 01 209 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	40	33.591.369	-	-	3	350.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	%	54,59	7.708.442.730	110,05	6.720.251.800	52,10	3.923.701.200	23,6	983.504.400	45,34	25,07	66,83	7.703.756.200	122,43	99,94		
5 02 04 201	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD	%	5,97	7.884.955.132	8	6.720.251.800	5,28	3.923.701.200	3,0	983.504.400	57,58	-	5,32	7.703.756.200	89,08	97,70		
		Persentase Kontribusi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Terhadap PAD	%	18,17		24		17,48		10,4		-		59,50		17,12	-	94,22	-
		Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	14,45		17		14,04		72,5		-		516,17		44,77	-	309,84	-
		Persentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	%	2,32		7		2,32		-		-		-		3,32	-	143,00	-
5 02 04 201 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	10	173.544.096	18	152.193.800	10	234.680.400	3	49.330.000	30,00	21,02	21,00	201.523.800	210,00	116,12		
5 02 04 201 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	138.597.231	2	90.720.700	1	10.524.900	-	1.882.100	-	17,88	2,00	92.602.800	200,00	66,81		
5 02 04 201 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	150	4.328.602.252	200	3.388.161.600	50	2.032.147.500	10	648.219.500	20,00	31,90	210,00	4.036.381.100	140,00	93,25		
5 02 04 201 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	1.562.953.378	24	1.190.234.500	12	582.076.500	3	133.000.000	25,00	22,85	27,00	1.323.234.500	225,00	84,66		
5 02 04 201 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	40.203.293	24	36.635.600	12	12.673.300	3	-	25,00	-	27,00	36.635.600	225,00	91,13		
5 02 04 201 0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	490.682.683	24	721.429.500	12	574.634.800	3	105.040.000	25,00	18,28	27,00	826.469.500	225,00	168,43		
5 02 04 201 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	1	474.465.806	13	1.005.140.200	12	349.825.500	3	32.932.800	25,00	9,41	16,00	1.038.073.000	1.600,00	218,79		
5 02 04 201 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	2	196.038.962	14	135.735.900	12	127.138.300	3	13.100.000	25,00	10,30	17,00	148.835.900	850,00	75,92		
5 02 04 201 0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1	479.867.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		JUMLAH TOTAL			93.108.153.689	-	66.638.193.227		23.738.268.562		3.281.904.487	35,72	13,83	-	51.699.705.131	216,5	55,5		

Berdasarkan Tabel II.1 (TC.29) dapat dilihat bahwa program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 2 program dan 10 kegiatan. Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024. Dari 2 program dan 10 kegiatan tersebut ada yang telah memenuhi target kinerja, melebihi target kinerja juga ada yang belum memenuhi target kinerja.

Secara umum capaian realisasi belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 mencapai Rp. 18.220.392.583,00 mencapai 80,72% dengan realisasi kinerja sebesar 125,42%.

Capaian kinerja masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
Capaian Realisasi Belanja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2024	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5		6		7	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	76,50	17.719.002.260	77,89	14.301.129.683	101,82	80,71
5	02	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	83.052.470	100	78.649.470	100,00	94,70
5	02	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	39.885.810	6	35.482.810	100,00	88,96
5	02	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	13.077.700	6	13.077.700	100,00	100,00
5	02	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	30.088.960	2	30.088.960	100,00	100,00
5	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Tepat Waktu	%	100	15.572.785.968	100	12.469.797.894	100,00	80,07
5	02	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.106	15.276.709.258	1.106	12.188.547.624	100,00	79,79
5	02	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	281.537.980	12	266.711.540	100,00	94,73
5	02	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.932.525	1	4.932.525	100,00	100,00

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2024	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5		6		7	
5	02	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	9.606.205	3	9.606.205	100,00	100,00
5	02	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	20.437.440	100	20.437.440	100,00	100,00
5	02	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	20.437.440	2	21.577.440	100,00	105,58
5	02	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah	%	100	23.767.800	100	18.767.800	100,00	78,96
5	02	01	204	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	23.767.800	12	18.767.800	100,00	78,96
5	02	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	%	100	152.280.490	100	152.280.490	100,00	100,00
5	02	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	152.280.490	5	127.178.490	100,00	83,52
5	02	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	50.000.000	4	40.000.000	100,00	80,00
5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	664.376.558	100	462.944.241	100,00	69,68
5	02	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	3.039.500	12	3.039.500	100,00	100,00
5	02	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	8.122.560	16	6.022.560	100,00	74,15
5	02	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	269.503.000	11	269.401.000	100,00	99,96
5	02	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		-	-	-	-	-
5	02	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	93.511.498	10	96.081.181	100,00	102,75
5	02	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	290.200.000	1	88.400.000	100,00	30,46
5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset yang direncanakan	%	100	99.354.000	100	94.054.000	100,00	94,67
5	02	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		-	-	-	-	-
5	02	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	99.354.000	5	94.054.000	100,00	94,67
5	02	01	207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	-	-	-	-
5	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	%	100	142.420.689	100	140.248.690	100,00	98,47
5	02	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		-	-	-	-	-
5	02	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	142.420.689	12	140.248.690	100,00	98,47
5	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	960.526.845	100	847.911.658	100,00	88,28
5	02	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	54.185.250	1	54.721.250	100,00	100,99

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2024		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2024	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	5		6		7	
5	02	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	367.083.940	63	323.232.753	100,00	88,05
5	02	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	539.257.655	5	469.957.655	100,00	87,15
5	02	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	-
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	%	49,61	4.853.387.400	80,28	3.919.262.900	161,82	80,75
5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD	%	4,59	4.853.387.400	15,2	3.919.262.900	331,00	80,75
						Persentase Kontribusi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Terhadap PAD	%	16,79		47,7	-	283,98	
						Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	13,63		34,2	-	250,55	
						Persentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	%	2,32		13,3	-	571,98	
5	02	04	201	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	10	174.830.400	10	93.495.400	100,00	53,48
5	02	04	201	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	132.885.100	1	88.245.100	100,00	66,41
5	02	04	201	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	50	2.488.440.100	50	1.856.499.700	100,00	74,60
5	02	04	201	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	747.059.400	12	638.189.400	100,00	85,43
5	02	04	201	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	12.673.300	12	11.649.200	100,00	91,92
5	02	04	201	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	706.134.800	12	665.069.800	100,00	94,18
5	02	04	201	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	497.912.500	12	479.712.500	100,00	96,34
5	02	04	201	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	93.451.800	12	86.401.800	100,00	92,46
5	02	04	201	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL								63,06	22.572.389.660	79,09	18.220.392.583	125,42	80,72

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan 2025 sampai dengan triwulan I, disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.3
Capaian Realisasi Belanja dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2025	
								K	Induk (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	6		7		8	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	79,50	19.814.567.362	-	2.298.400.087	-	11,60
5	02	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Daerah	%	100	230.057.450	38	15.286.800	37,50	6,64
5	02	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	50.675.750	3	9.400.000	50,00	18,55
5	02	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-	-	-	-	-	-
5	02	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	179.381.700	-	5.886.800	-	3,28
5	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Tepat Waktu	%	100	16.208.191.673	29	1.894.454.190	28,52	11,69
5	02	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.106	15.983.145.363	316	1.853.780.590	28,57	11,60
5	02	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	210.610.480	3	40.173.600	25,00	19,07
5	02	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.839.625	1	-	100,00	-
5	02	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	9.596.205	-	500.000	-	5,21
5	02	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	15.147.440	-	2.692.440	-	17,77
5	02	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15.147.440	-	2.692.440	-	17,77
5	02	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah	%	100	58.931.300	25	12.870.000	25,00	21,84
5	02	01	204	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	58.931.300	3	12.870.000	25,00	21,84
5	02	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	%	100	402.911.090	-	44.335.690	-	11,00
5	02	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	327.911.090	-	44.335.690	-	13,52
5	02	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	75.000.000	-	-	-	-
5	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	564.970.220	16	22.416.680	16,00	3,97
5	02	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.186.500	2	-	16,67	-
5	02	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	8.487.220	2	-	12,50	-
5	02	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	177.334.500	2	-	18,18	-
5	02	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2025	
								K	Induk (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4	6		7		8	
5	02	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	206.813.000	1	8.116.680	10,00	3,92
5	02	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	170.149.000	-	14.300.000	-	8,40
5	02	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset yang direncanakan	%	100	1.340.907.330	20	203.055.000	20,00	15,14
5	02	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-
5	02	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1.340.907.330	1	203.055.000	20,00	15,14
5	02	01	207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-
5	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	%	100	118.576.344	25	14.061.878	25,00	11,86
5	02	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	-	-	-	-	-	-
5	02	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	118.576.344	3	14.061.878	25,00	11,86
5	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	874.874.515	14	89.227.409	14,49	10,20
5	02	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	82.150.000	1	1.018.939	100,00	1,24
5	02	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	374.674.515	7	20.308.470	11,11	5,42
5	02	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	67.900.000	2	67.900.000	40,00	100,00
5	02	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	350.150.000	-	-	-	-
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	%	52,10	3.923.701.200	24	983.504.400	45,34	25,07
5	02	04	201		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD	%	5,28	3.923.701.200	3	983.504.400	57,58	25,07
						Persentase Kontribusi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Terhadap PAD	%	17,48		10	-	59,50	
						Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	14,04		72	-	516,17	
						Persentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	%	2,32		-	-	-	
5	02	04	201	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	10	234.680.400	3	49.330.000	30,00	21,02
5	02	04	201	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	10.524.900	-	1.882.100	-	17,88
5	02	04	201	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	50	2.032.147.500	10	648.219.500	20,00	31,90
5	02	04	201	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	582.076.500	3	133.000.000	25,00	22,85
5	02	04	201	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	12.673.300	3	-	25,00	-
5	02	04	201	0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	574.634.800	3	105.040.000	25,00	18,28
5	02	04	201	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	349.825.500	3	32.932.800	25,00	9,41

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Th 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Th 2025					
				K	Induk (Rp.)	K	Rp.	K	Rp.				
1					6		7		8				
5	02	04	201	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	127.138.300	3	13.100.000	25,00	10,30
5	02	04	201	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL								65,80	23.738.268.562	12	3.281.904.487	17,95	13,83

Dari table diatas dapat di jelaskan bahwa realisasi anggaran sampai dengan triwulan I saat disusunnya Rencana Kerja ini mencapai mencapai 13,83% dari anggaran sebesar Rp. 23.738.268.562,00. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terealisasi Rp. 2.298.400.087 atau 11,60% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 19.814.567.362,00.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggung jawabkan, serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran, sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur berdasarkan indikator kinerja pada hasil evaluasi RPJMD dan evaluasi Renstra PD Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

Tabel II.4 Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan :									
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	%	16,24	23.738.268.562	16,95	3.281.904.487	104,37	13,83
Sasaran :									
	Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi	Persentase Pertumbuhan PAD	%	12,49	23.738.268.562	17,97	3.281.904.487	141,47	13,83
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Nilai	79,50	19.814.567.362		2.298.400.087	0,00	11,60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	%	100	230.057.450	38	15.286.800	37,50	6,64
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	50.675.750	3	9.400.000	50,00	18,55
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	179.381.700	-	5.886.800	0,00	3,28
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Tepat Waktu	%	100	16.208.191.673	28,52	1.894.454.190	28,52	11,69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	1.106	15.983.145.363	316	1.853.780.590	28,57	11,60
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	210.610.480	3	40.173.600	25,00	19,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.839.625	1		100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	9.596.205		500.000	0,00	5,21
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	%	100	15.147.440	-	2.692.440	0,00	17,77
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	15.147.440	-	2.692.440	0,00	17,77

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah	%	100	58.931.300	25	12.870.000	25,00	21,84
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	58.931.300	3	12.870.000	25,00	21,84
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	%	100	402.911.090	22,22	44.335.690	22,22	11,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	327.911.090	2	44.335.690	40,00	13,52
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	4	75.000.000			0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	564.970.220	14,00	22.416.680	14,00	3,97
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	2.186.500	2		16,67	0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	16	8.487.220	2		12,50	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	11	177.334.500	2		18,18	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	206.813.000	1	8.116.680	10,00	3,92
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	170.149.000		14.300.000	0,00	8,40
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan asset yang direncanakan	%	100	1.340.907.330	20	203.055.000	20,00	15,14
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1.340.907.330	1	203.055.000	20,00	15,14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	%	100	118.576.344	25	14.061.878	25,00	11,86
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	118.576.344	3	14.061.878	25,00	11,86
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	874.874.515	15,28	89.227.409	15,28	10,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	82.150.000	1,00	1.018.939	100,00	1,24

Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran	
			Satuan	K	Rp.	K	Rp.	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	63	374.674.515	7	20.308.470	11,11	5,42
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	67.900.000	2	67.900.000	40,00	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	350.150.000	1		33,33	0,00
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi PAD	%	52,10	3.923.701.200	23,6	983.504.400	45,34	25,07
	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD	%	5,28	3.923.701.200	3,04	983.504.400	57,58	25,07
		Persentase Kontribusi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB Terhadap PAD	%	17,48		10,40		59,50	
		Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	14,04		72,47		516,17	
		Persentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah	%	2,32		4,31		185,78	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	10	234.680.400	3	49.330.000	30,00	21,02
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	10.524.900		1.882.100	0,00	17,88
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	50	2.032.147.500	10	648.219.500	20,00	31,90
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	582.076.500	3	133.000.000	25,00	22,85
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	12.673.300	3		25,00	0,00
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	574.634.800	3	105.040.000	25,00	18,28
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	349.825.500	3	32.932.800	25,00	9,41
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	127.138.300	3	13.100.000	25,00	10,30

Selama Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur ditunjang dengan menganggarkan kebutuhan pelaksanaan 2 program 10 kegiatan dan 29 sub kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 dengan total keseluruhan anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp. **23.738.268.562,00**. Capaian realisasi Program kegiatan dan sub kegiatan Triwulan I sebesar Rp. **3.281.904.487,00**. Adapun serapan anggaran telah mencapai 13,83 %.

Dari tabel diatas realisasi capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur sebesar **13,83%** dengan tingkat capaian kinerja sebesar **104,37%**. Sedangkan untuk realisasi anggaran Triwulan I sebesar Rp. **3.281.904.487,00** atau **13,83%** dari target Rp. **23.738.268.562,00**. Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pendapatan Daerah telah menentukan 1 (satu) tujuan dengan 7 (tujuh) indikator sasaran strategis. Sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Rencana strategis.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur telah menggunakan anggaran secara efektif dan efisien.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur yang merupakan unsur pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Kewenangan yang diberikan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih prima. Untuk itu Bapenda dituntut kreatif dalam menggali potensi PAD, sehingga dapat meningkatkan PAD. Dalam upaya peningkatan PAD perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan/kebocoran dari pajak daerah dan retribusi daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme sebagai berikut : untuk pengelolaan dan pemungutan

pajak daerah dan retribusi pengelolaan kekayaan daerah dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, sedangkan pengelolaan dan pemungutan untuk retribusi daerah dilaksanakan sepenuhnya oleh OPD Teknis Penghasil terkait, yang kemudian disetorkan ke rekening Kas Daerah. Selanjutnya OPD Teknis Penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati cq. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam upaya peningkatan PAD, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data potensi pajak daerah;
- b. Melakukan optimalisasi penagihan;
- c. Melakukan sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran terhadap wajib pajak;
- d. Pengembangan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara digital;
- e. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka peningkatan pelayanandan optimalisasi pendapatan, diantaranya yaitu DPRD, Kejaksaan, TNI, Polri, Satpol PP, Bank NTB Syariah, Bank Indonesia, BPN, PPAT, Indomaret, Tokopedia, Linkaja.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang. Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan permasalahan dan hambatan baik internal maupun eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan internal :
 - Masih kurangnya tenaga yang berkualifikasi tertentu seperti juru sita, pemeriksa pajak, penilai pajak, penilai asset (appraisal) dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - Belum sempurnanya *data base* pajak daerah dan retribusi daerah, belum

berbasis aplikasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan perhitungan target PAD;

- Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek/wajib pajak serta asset sarana dan prasarana pendukung yang masih belum optimal;
- Kemampuan dan keterampilan SDM Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur belum memenuhi standar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Permasalahan eksternal :

- Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan PAD yang bersumber dari pajak daerah;
- Kondisi perekonomian yang berpangrauh terhadap PAD.

3. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut :

- Dengan semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Lombok Timur, harus diimbangi dengan perbaikan pengelolaan sarana dan prasarana secara optimal;
- Masih rendahnya pemahaman, kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak yang tepat waktu.
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah khususnya penerimaan pendapatan daerah.

b. Peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik yaitu :

- Dukungan dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;
- Kondisi yang cukup kondusif di Kabupaten Lombok Timur sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor dalam berinvestasi di Kabupaten Lombok Timur yang berdampak pada peningkatan potensi PAD;
- Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital dalam

- menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada public;
- Masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara optimal sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus terus ditingkatkan;
- Sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Lombok Timur;
- Kerjasama yang terjalin baik dengan beberapa *stakeholder*, memudahkan dalam upaya untuk melakukan inovasi pelayanan kepada publik.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjarangan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh BAPENDA Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
NIHIL					

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah. Dan untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional, diperlukan pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 yang berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2026. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sasaran utama pembangunan nasional merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang harus disukseskan bersama-sama sehingga sasaran dapat dicapai sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan dan harus sejalan dengan prioritas pembangunan di daerah. Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur harus mendukung tercapainya sasaran utama daerah, provinsi dan juga nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2030. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dibidang pendapatan, yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2030.

Mencermati indikasi rencana program prioritas daerah Kabupaten Lombok Timur dan isu-isu strategis Tahun 2026, maka tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah :

“Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis digital”

Adapun sasaran dari Badan Pendaparan Daerah Kabupaten Lombok Timur adalah:

“Meningkatnya pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah”

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Program, prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Tujuan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan inovatif	Rasio PAD	14,56%

Tabel III.2
Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya PAD melalui Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan	1.1 Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD	6,4%
		1.2 Kontribusi Pajak Daerah Lainnya terhadap PAD	25,9%
		1.3 Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	63,61%
		1.4 Persentase Realisasi Tunggal Pajak Daerah	2,68%
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Skor SAKIP Perangkat Daerah	78,57 (BB)

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan yang disusun dan diajukan untuk ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2026 adalah program untuk mendukung urusan wajib dan fungsi SKPD yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran, telah ditetapkan 2 program 10 kegiatan dan 59 sub kegiatan dalam renja yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 kegiatan dan 44 sub kegiatan;
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat 1 kegiatan dan 15 sub kegiatan.

Dengan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - e. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - f. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
 - g. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- c. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah
 - d. Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
 - e. Pengolahan Data Retribusi Daerah
 - f. Penetapan Wajib Retribusi Daerah
 - g. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
 - e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - g. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - h. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - i. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - j. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
 - k. Penagihan Pajak Daerah
 - l. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
 - m. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - n. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - o. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur. Adapun Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel TC.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Kabupaten Lombok Timur

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Thn 2027	
		Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu indikatif
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Skor SAKIP Perangkat Daerah		78,57	23.632.574.842,00			78,91	27.177.461.068,30
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	Lombok Timur	100	410.273.036,25	APBD II		100	471.813.991,69
X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	50.251.393,75			6	57.789.102,81
X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4	17.077.700,00			4	19.639.355,00
X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		8	14.077.700,00			8	16.189.355,00
X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6	183.866.242,50			6	211.446.178,88
X.XX.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1	20.000.000,00			1	23.000.000,00
X.XX.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		15	15.000.000,00			15	17.250.000,00
X.XX.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2	75.000.000,00			2	86.250.000,00
X.XX.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun		2	35.000.000,00			2	40.250.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Tepat Waktu	Lombok Timur	100	16.685.347.754,53	APBD II		100	19.188.149.917,70
X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1106	16.406.927.033,03			1106	18.867.966.087,98

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Thn 2027	
		Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu indikatif
X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	263.263.100,00			12	302.752.565,00
X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1	5.081.606,25			1	5.843.847,19
X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12	10.076.015,25			12	11.587.417,54
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan asset/barang milik daerah	Lombok Timur	100	53.026.126,00	APBD II		100	60.980.044,90
X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	20.000.000,00			1	23.000.000,00
X.XX.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	17.500.000,00			2	20.125.000,00
X.XX.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	15.526.126,00			2	17.855.044,90
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah	Lombok Timur	100	300.404.582,50	APBD II		100	345.465.269,88
X.XX.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1	30.000.000,00			1	34.500.000,00
X.XX.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah		1	65.000.000,00			1	74.750.000,00
X.XX.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		12	50.000.000,00			12	57.500.000,00
X.XX.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		3	55.000.000,00			3	63.250.000,00
X.XX.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah		12	25.000.000,00			12	28.750.000,00
X.XX.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		12	15.000.000,00			12	17.250.000,00
X.XX.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12	60.404.582,50			12	69.465.269,88
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian	Lombok Timur	100	479.858.867,25	APBD II		100	551.837.697,34
X.XX.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		2	65.000.000,00			2	74.750.000,00
X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		5	336.108.867,25			5	386.525.197,34
X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5	78.750.000,00			6	90.562.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	Lombok Timur	100	637.130.350,50	APBD II		100	732.699.903,08
X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	2.241.162,50			12	2.577.336,88
X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		10	65.000.000,00			11	74.750.000,00
X.XX.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		16	8.699.400,50			16	10.004.310,58
X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang		11	181.767.862,50			11	209.033.041,88

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Thn 2027	
		Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu indikatif
Penggandaan	Disediakan							
X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5	80.819.200,00			5	92.942.080,00
X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		12	75.000.000,00			12	86.250.000,00
X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	223.602.725,00			1	257.143.133,75
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian pengadaan BMD yang direncanakan	Lombok Timur	100	2.853.627.696,50	APBD II		100	3.281.671.850,98
X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1	350.000.000,00			10	402.500.000,00
X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		50	650.000.000,00			55	747.500.000,00
X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	1.453.627.696,50			5	1.671.671.850,98
X.XX.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		2	400.000.000,00			2	460.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	Lombok Timur	100	221.540.752,60	APBD II		100	254.771.865,49
X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10000	100.000.000,00			11.500	115.000.000,00
X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	121.540.752,60			12	139.771.865,49
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Lombok Timur	100	1.991.365.675,87	APBD II		100	2.290.070.527,25
X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2	86.257.500,00			2	99.196.125,00
X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		64	393.408.240,75			65	452.419.476,86
X.XX.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		75	35.000.000,00			75	40.250.000,00
X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		50	50.000.000,00			50	57.500.000,00
X.XX.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara		3	200.000.000,00			3	230.000.000,00
X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5	838.347.500,00			5	964.099.625,00
X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	388.352.435,12			3	446.605.300,39
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.1. Kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD		6,40%	5.581.395.510,00			6,65%	6.418.604.836,50
	1.2. Kontribusi Pajak Daerah Lainnya terhadap PAD		25,90%				27,90%	
	1.3. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD		63,61%				65,72%	
	1.4. Persentase Realisasi Tunggakan Pajak Daerah		2,68%				2,86%	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan daerah	Lombok Timur	85,00%	5.581.395.510,00	APBD II		90,00%	6.418.604.836,50
5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		2	150.000.000,00			2	172.500.000,00

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Thn 2027	
		Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu indikatif
5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		1	75.000.000,00			1	86.250.000,00
5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		21	246.414.420,00			21	283.376.583,00
5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		5	1.000.000.000,00			5	1.150.000.000,00
5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12	75.000.000,00			12	86.250.000,00
5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		1	10.998.520,50			1	12.648.298,58
5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		100	2.042.404.875,00			100	2.348.765.606,25
5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		12	611.180.325,00			12	702.857.373,75
5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		12	35.000.000,00			12	40.250.000,00
5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		12	13.306.965,00			12	15.303.009,75
5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		12	633.663.233,50			12	728.712.718,53
5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		1	25.000.000,00			1	28.750.000,00
5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		2	365.567.647,50			2	420.402.794,63
5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		2	132.859.523,50			2	152.788.452,03
5.02.04.2.01.0015 Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektrifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		2	165.000.000,00			2	189.750.000,00

Berdasarkan Tabel TC.33 kebutuhan dana/pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2026 yaitu sebesar **Rp. 29.213.970.352,00** (*dua puluh Sembilan miliar dua ratus tigas belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*) dengan komposisi program yang terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan 1 program pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu untuk prakiraan maju rencana tahun 2027 tidak terdapat perubahan pada jumlah program, masih seperti tahun 2026 dengan komposisi program yang sama yakni terdiri dari 1 program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan 1 program pengelolaan pendapatan daerah.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Tahun Perencanaan Kabupaten Lombok Timur sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2026. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya.

Adapun sebagai alat perencanaan dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran yang akan dituangkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026, Rencana Kerja Tahunan BAPENDA sebagai pedoman didalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan satu (1) tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2026 berisi perencanaan berbagi program dan kegiatan untuk mencapaitujuan organisasi dan alternatif sumber pembiayaannya;
2. Seluruh pegawai BAPENDA berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program Rencana Kerja BAPENDA Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun 2026, Rencana Kerja Tahunan BAPENDA Tahun 2026 ini disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam perencanaan sebagaimana yang telah diamanatkan;

4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja BAPENDA Tahun 2026, maka dilakukan pemantauan dan analisa terhadap penjabaran dan sinergisitas ke dalam rencana program dan kegiatan yang terdapat pada bidang-bidang, serta kelanjutannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebelumnya.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja BAPENDA selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BAPENDA. Untuk dapat dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPENDA Tahun 2026 tentu dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekak serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Rencana Kerja BAPENDA juga memberi *feedback* dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja BadanPendapatan DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun 2026 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah direncanakan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan,atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Selong, Mei 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

